

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perusahaan adalah organisasi yang dibentuk dengan tujuan untuk mendapatkan laba. Dengan adanya laba, maka perusahaan dapat terus melanjutkan usahanya, disamping itu perusahaan juga memiliki kewajiban jika memperoleh laba yaitu dengan membayar pajak. Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya berdasarkan peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah [1]. Bagi pihak pemerintah semakin besar laba, maka akan semakin besar pula jumlah pajak yang di bayarkan. Tujuan pemerintah dalam memaksimalkan penerimaan pajak bertentangan dengan tujuan dari perusahaan sebagai subjek pajak, dimana perusahaan berupaya dalam meminimalisir biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh laba yang maksimal sehingga dapat menjaga kelangsungan operasi perusahaan seperti melakukan tindakan Agresivitas Pajak.

Tindakan Agresivitas Pajak adalah perencanaan pajak yang sengaja dibuat semata-mata untuk mengurangi beban pajak melalui suatu transaksi yang tidak mempunyai substansi tujuan bisnis, tanpa melanggar peraturan perpajakan. Kasus Agresivitas Pajak yang sering ditemukan adalah dalam bentuk penghindaran pajak yang ditemukan oleh pihak yang berwenang untuk menangani kasus tersebut di berbagai sektor usaha dan ekonomi. Pada saat ini Perusahaan Indonesia yang tercatat mendirikan anak perusahaan di negara surga pajak (*Tax Heaven*) adalah PT. Elnusa Tbk (Elnusa) yang tercatat di Bursa Saham Indonesia, dalam pernyataan *International Consortium of Investigative Journalists* (ICIJ) mengungkap keberadaan tiga anak perusahaan Elnusa yang melakukan praktik menyembunyikan dana untuk menghindari pajak di tahun 2016 [2]. Selain PT. Elnusa ada juga perusahaan yang membentuk anak

perusahaan diluar negeri yaitu Bumi Resource dan Breau Coal, kemudian perusahaan tersebut melakukan transaksi yang direncanakan sehingga pendapatan lebih rendah dan pajak yang dibayarkan menjadi lebih murah, sehingga merugikan pemerintah Indonesia dari segi hal pajak [3]. Disamping itu juga ada kasus yang menyeret perusahaan PT. Wilmar Nabati Indonesia yang terindikasi melakukan transaksi yang tidak seharusnya sehingga merugikan pemerintahan dengan melakukan restitusi pajak melalui transaksi yang tidak wajar yang terkait dengan upaya penghindaran pajak dengan melakukan *transfer pricing* [4]. Dengan adanya kasus pajak yang menyeret nama perusahaan seperti Elnusa, Bumi Resource dan Breau Coal dan PT. Wilmar Nabati Indonesia memiliki indikasi kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak yang menunjukkan, masih ada perusahaan yang kurang sadar ataupun sengaja melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak secara legal untuk mengurangi atau meniadakan kewajiban pajak. Walaupun secara literal tidak ada hukum yang dilanggar, penghindaran pajak tidak dapat diterima karena penghindaran pajak tersebut menyebabkan semakin kecilnya pajak yang dibayar kepada pihak pemerintah. Penghindaran pajak umumnya memanfaatkan celah-celah yang ada dalam peraturan perpajakan (*grey area*). Penghindaran pajak ini juga dapat disebabkan oleh lemahnya tata kelola perusahaan tersebut. Adapun yang diduga dapat mempengaruhi Agresivitas Pajak, yaitu Rasio Keuangan (Solvabilitas, Likuiditas, Profitabilitas), *Corporate Governance* (Komisaris Independen, Komite Audit, Dewan Direksi)

Solvabilitas atau *leverage* adalah sebuah indikator yang menunjukkan seberapa besar aset yang dimiliki oleh perusahaan yang dibiayai oleh utang [5]. Solvabilitas pada penelitian ini diproksikan dengan *Debt Equity Ratio* (DER). Perusahaan dengan tingkat Solvabilitas yang tinggi dapat meminimalkan pembayaran pajak, karena tingkat Solvabilitas yang tinggi menunjukkan pendanaan melalui hutang cukup tinggi, yang akan menimbulkan beban bunga sehingga dapat mengurangi pendapatan perusahaan sehingga dapat menghemat pembayaran pajak. Dengan adanya peluang tersebut, manager cenderung akan memilih pendanaan perusahaan melalui hutang dibandingkan pendanaan melalui ekuitas, yang akan menyebabkan

Solvabilitas perusahaan menjadi tinggi. Hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa Solvabilitas berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak [6]. Namun hasil peneliti yang lain menunjukkan bahwa Solvabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak [7].

Likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset lancar yang dimiliki perusahaan [8]. Likuiditas pada penelitian ini diproksikan dengan *Current Ratio* (CR). Perusahaan yang tingkat Likuiditasnya tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aset lancar yang cukup banyak, sehingga dapat digunakan untuk melakukan penghindaran pajak dengan membeli aset tetap. Pembelian aset tetap tersebut perusahaan telah melakukan Agresivitas pajak karena menimbulkan beban penyusutan, yang dapat mengurangi beban pajak yang akan dibayar. Oleh karena itu Likuiditas perusahaan dapat mempengaruhi tingkat Agresivitas Pajak. Hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa Likuiditas berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak [9]. Namun hasil peneliti yang lain menunjukkan Likuiditas perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas wajib pajak badan [7].

Profitabilitas menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih [5]. Profitabilitas pada penelitian ini diproksikan dengan *Return on Asset* (ROA). Semakin tinggi profitabilitas perusahaan, maka beban pajak semakin tinggi juga. Semakin tingginya pajak, karena perusahaan merasa tebebani. Sehingga perusahaan semakin agresif terhadap pajak. Hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak [10]. Namun hasil peneliti yang lain menunjukkan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak [11].

Corporate Governance diduga dapat mempengaruhi tingkat Agresivitas Pajak perusahaan. *Corporate Governance* yang efektif pada suatu perusahaan dapat membantu otoritas pajak dalam menangani dan menekan tingkat Agresivitas Pajak. Pada penelitian ini *Corporate Governance* menggunakan tiga penerapan yaitu komisaris independen memiliki peran sebagai penyeimbang kekuatan dalam

mengambil keputusan oleh dewan komisaris. Komisaris independen bertugas dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen, karena dalam diri komisaris melekat tanggung jawab secara hukum [12]. Pengawasannya dapat berupa menilai bahwa pengambilan keputusan atau tindakan yang diambil oleh dewan direksi, agar tidak melanggar peraturan di Indonesia seperti menghindari maupun menggelapkan pajak. Hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak [13]. Namun hasil peneliti yang lain menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak [7].

Komite audit bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertugas membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan [12]. Adapun dengan ketatnya pengawasan terhadap pihak-pihak manajemen dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu komite audit dianggap dapat mengurangi kesempatan manajer bertindak agresif terhadap pajak perusahaan. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak [14]. Hasil peneliti yang lain menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap tingkat Agresivitas Pajak perusahaan [13].

Dewan direksi sebagai organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab secara kolegiat dalam mengelola perusahaan. Dewan direksi bertanggung jawab mengawasi jalannya perusahaan [15]. Dewan direksi juga bertugas untuk merumuskan kebijakan-kebijakan perusahaan, dan mengontrol manajemen perusahaan agar perusahaan dijalankan sesuai dengan kebijakan tersebut, kontrol dalam bentuk meminimalan tindakan agresivitas pajak oleh pihak manajemen. Penelitian terdahulu menunjukkan dewan direksi berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak [13], selain itu terdapat penelitian lain yang menunjukkan dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak perusahaan [16]. Namun peneliti yang lain menunjukkan bahwa kehadiran dewan direksi tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak [17].

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan bukti tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya, serta bentuk komitmen keberlanjutan perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi untuk pembangunan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas hidup, karyawan, keluarga, komunitas lokal dan masyarakat luas. Tanggung jawab perusahaan dapat tercermin dari informasi laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan dan tata kelola perusahaan yang baik untuk menjaga kepercayaan pihak stakeholder terhadap perusahaan, bahwa perusahaan memiliki citra yang baik dimata stakeholder. Perusahaan yang memiliki citra yang baik tentunya memiliki kontribusi besar dalam mensejahterakan lingkungan sekitarnya. Dengan kesadaran perusahaan akan pentingnya kontribusi perusahaan tersebut maka perusahaan tidak akan melakukan tindakan agresivitas pajak, yang tentunya agresivitas pajak tersebut merupakan tindakan yang kurang bertanggung jawab. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak [10]. Namun peneliti yang lain menunjukkan CSR tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak [18].

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti ingin meneliti lebih lanjut dengan judul "Pengaruh Rasio Keuangan Dan *Corporate Governance* Terhadap Agresivitas Pajak Dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Sektor Utama Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016."

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Rasio Keuangan (Solvabilitas, Likuiditas, dan Profitabilitas) dan *Corporate Governance* (Komisaris Independen, Komite Audit, dan Dewan Direksi) baik secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan sektor utama yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016?

2. Apakah *Corporate Social Responsibility* (CSR) mampu memoderasi hubungan Rasio Keuangan (Solvabilitas, Likuiditas, dan Profitabilitas) dan *Corporate Governance* (Komisaris Independen, Komite Audit, dan Dewan Direksi) dengan Agresivitas Pajak pada perusahaan sektor utama yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah sebagai berikut:

1. Variabel dependen pada penelitian ini adalah Agresivitas Pajak yang diprosikan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR).
2. Variabel independen Penelitian:
 - a. Rasio keuangan yang terdiri dari: Solvabilitas diprosikan dengan rasio *Debt Equity Ratio* (DER), Likuiditas diprosikan dengan *Current Ratio* (CR), profitabilitas diprosikan dengan dengan rasio *Return on Asset* (ROA).
 - b. *Corporate Governance* terdiri dari: komisaris independen, komite audit, dewan direksi.
3. Variabel Moderasi yang digunakan pada penelitian ini adalah *Corporate Social Responsibility* (CSR).
4. Objek pada penelitian ini adalah perusahaan sektor utama yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
5. Periode pengamatan yang dilakukan adalah 2013-2016.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain adalah untuk:

- a. Untuk mengetahui pengaruh Rasio Keuangan (Solvabilitas, Likuiditas, dan Profitabilitas) dan *Corporate Governance* (Komisaris Independen, Komite Audit, dan Dewan Direksi) baik secara simultan maupun parsial terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan sektor utama yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016.

- b. Untuk mengetahui kemampuan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam memoderasi hubungan Rasio Keuangan (Solvabilitas, Likuiditas, dan Profitabilitas) dan *Corporate Governance* (Komisaris Independen, Komite Audit, dan Dewan Direksi) dengan Agresivitas Pajak perusahaan sektor utama yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2016.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Bagi Investor

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi investor dalam untuk mengambil keputusan dalam berinvestasi pada perusahaan yang memiliki tanggung jawab yang terhadap dampak operasional perusahaannya.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji masalah Agresivitas Pajak.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam mendeteksi celah-celah yang dipergunakan dalam tindakan Agresivitas Pajak.

1.6. Originalitas Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu dengan judul penelitian “Pengaruh Profitabilitas dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak Penghasilan Wajib Pajak” [10]. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Dari segi variabel Independen

Variabel independen penelitian terdahulu adalah profitabilitas yang diprosikan dengan *Return on Asset* (ROA) dan *Corporate Social Responsibility*. Pada penelitian ini ditambahkan variabel dependen yaitu Likuiditas, Solvabilitas,

Corporate Governance yang terdiri dari komisaris independen, komite audit, dewan direksi. Alasan penambahan variabel berikut adalah:

- a. Variabel Solvabilitas ditambahkan pada penelitian ini karena rasio Solvabilitas perusahaan menunjukkan sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh utang perusahaan [5]. Perusahaan yang memiliki tingkat Solvabilitas yang tinggi menunjukkan pendanaan melalui hutang yang cukup besar, akan meningkatkan beban bunga yang tinggi pula, sehingga pajak yang dibayar menjadi lebih rendah. Cara tersebut dapat digunakan oleh pihak manajemen untuk menghemat pembayaran pajak yang sering disebut dengan Agresivitas Pajak. Tindakan dalam meningkatkan Solvabilitas diluar batas wajar berindikasi adanya upaya dalam meminimalkan pajak yang tergolong tindakan Agresivitas Pajak. Maka dengan tingkat Solvabilitas yang tinggi, perusahaan berindikasi melakukan Agresivitas Pajak.
- b. Variabel Likuiditas ditambahkan pada penelitian ini karena perusahaan yang memiliki tingkat Likuiditas yang baik menunjukkan kemampuan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya [8]. Tingkat Likuiditas yang baik pada perusahaan, menunjukkan perusahaan memiliki aset lancar yang cukup, sehingga dimanfaatkan untuk menghindari pajak, dengan membeli aset tetap yang menimbulkan beban penyusutan yang dapat meminimalkan pembayaran pajak. Oleh karena itu, tingkat Likuiditas perusahaan dapat mempengaruhi tindakan Agresivitas Pajak perusahaan.
- c. Variabel Dewan Direksi ditambahkan pada penelitian ini karena Dewan Direksi memiliki tugas dalam mengelola manajemen perusahaan secara efektif dan efisien [12]. Perusahaan dan pemerintah memiliki kepentingan yang bertolak belakang. Perusahaan berupaya meminimalkan pembayaran pajak, sedangkan pemerintah berupaya untuk memaksimalkan penerimaannya melalui pajak. Kehadiran dewan direksi dianggap mampu mengurangi benturan kepentingan tersebut.
- d. Variabel Komisaris Independen ditambahkan pada penelitian karena dengan adanya komisaris independen, maka dalam setiap perumusan strategi perusahaan yang dilakukan oleh dewan komisaris beserta manajemen perusahaan dan para

stakeholder akan memberikan jaminan hasil yang efektif dan efisien termasuk dalam kebijakan yang terkait dengan Agresivitas Pajak [12].

- e. Variabel Komite Audit ditambahkan karena komite audit memiliki peranan pengawasan dalam memastikan bahwa, laporan keuangan disajikan secara wajar dan melakukan pengendalian internal perusahaan agar terlaksana dengan baik [19]. Sehingga dengan adanya komite audit dapat mengawasi tindakan manajemen dalam mengambil keputusan agar tidak melanggar hukum yang berlaku. Dengan semakin ketatnya pengawasan yang dilakukan oleh komite audit, maka akan menghasilkan informasi yang berkualitas dan kinerja yang efektif.

2. Dari segi variabel moderasi

Pada penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel moderasi. Pada penelitian ini peneliti menambahkan variabel moderasi yaitu *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang sebelumnya merupakan variabel independen pada penelitian terdahulu. Alasan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dijadikan variabel moderasi, karena dengan adanya CSR menunjukkan seberapa transparan informasi yang diungkapkan pada laporan keuangan.

3. Dari segi objek pengamatan

Objek pengamatan pada penelitian ini adalah perusahaan Sektor Utama yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sedangkan penelitian terdahulu menggunakan perusahaan Sektor Manufaktur

4. Dari segi periode pengamatan

Periode pengamatan pada penelitian terdahulu adalah tahun 2011-2014. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tahun pengamatan 2013-2016.